

Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI

The Urgency of Increasing Women's Representation in Indonesian House of Representatives (DPR RI)

Audrey Una De Vito¹, Lidya Nurjannah², Anggi Anggraeni Kusumoningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01

Hal : 136-146

Diterbitkan : 01 Juli 2025

KORESPONDENSI

No Handphone : 0895-1574-1324

E-mail : audreydevito@gmail.com

A b s t r a k

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif. Menurut data dari DPR RI dalam Presentase Keterwakilan Perempuan di DPR pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kursi DPR RI belum mencapai 30% sesuai batas minimal, dikarenakan banyak kendala yang dialami perempuan. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan memperkuat demokrasi dengan memperkenalkan perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki representasi perempuan di DPR RI perlu dioptimalkan melalui reformasi kebijakan, pendidikan politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partisipasi Politik Perempuan, Kesetaraan Gender.

A b s t r a c t

This study aims to determine the extent of women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR RI). Using a qualitative approach with a case study method and descriptive analysis. According to data from the Indonesia House of Representatives (DPR RI) the percentage of women's representation in DPR in 2023 shows that women's representation in parliamentary seats has not yet reached the minimum threshold of 30%. This due to various obstacles faced by women. Increasing women's representation in the legislature can lead to more gender-sensitive policies and strengthen democracy by introducing a more diverse perspective in public decision-making. Therefore, efforts to improve women's representation in the DPR RI need to be optimized through policy reform, political education, and raising public awareness of the importance of women's participation in politics.

Keywords: Women's Representation, House of Representation (DPR), Women's Political Participation, Gender Equality.

Latar Belakang

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), telah lama menjadi isu yang penting dalam pembicaraan tentang kesetaraan gender dan kualitas demokrasi. Indonesia, sebagai negara

dengan lebih dari 270 juta penduduk, memiliki lebih dari 49% perempuan dalam komposisi populasi (Badan Pusat Statistik, 2024) namun representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, terutama di DPR RI, masih tergolong rendah. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam pemilihan 2019, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI hanya 120 kursi meskipun ada kuota 30% untuk calon legislatif perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang..

Pada pemilihan 2024, keterwakilan di DPR RI mengalami peningkatan menjadi 127 kursi dari total 580 kursi DPR RI. Dalam peningkatan keterwakilan perempuan diharapkan dapat memperkuat demokrasi dengan menciptakan representasi yang lebih seimbang, sehingga dapat memastikan semua kelompok perempuan memiliki suara dalam pembuatan kebijakan.

Keberadaan perempuan dalam DPR RI sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan perempuan dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi serta perlindungan dari kekerasan. Tanpa keterwakilan yang memadai, isu-isu yang krusial bagi perempuan seringkali terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Nancy Levit dalam bukunya yang berjudul *Feminist Legal Theory*, mengidentifikasi empat kategori utama, yaitu, *Equal Treatment Theory* yang menekankan pada perlunya kesetaraan hal antara perempuan dan laki-laki, lalu *Cultural Feminism* berfokus pada perbedaan antara gender dan bagaimana peran sosial mempengaruhi posisi perempuan, kemudian *Dominance theory* yang mengkritik patriarki dan struktur kekuasaan yang menindas perempuan, dan yang terakhir *Critical Race Feminism* menyoroti interaksi antara ras dan gender dalam konteks hukum. Teori ini bertujuan untuk mengubah keadaan negara dengan mengatasi diskriminasi gender perempuan dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mencakup kritik terhadap ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan sosial. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya tumpang tindih kesetaraan gender, yaitu dengan memahami bahwa pengalaman perempuan tidak homogen dan dipengaruhi oleh berbagai identitas sosial lainnya seperti ras, kelas, dan orientasi seksual. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang urgensi peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berdasarkan pada *filosofis post-positivis*, digunakan untuk mempelajari objek-objek alam tanpa eksperimen, dengan fokus pada pengambilan data yang bersifat deskriptif dan analisis induktif. Sugiyono menekankan bahwa temuan dari penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk tingkah laku, persepsi, dan motivasi. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alamiah dan menggunakan berbagai metode untuk menggali informasi secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam lembaga

legislatif serta memberikan pemahaman lebih tentang dinamika yang ada di balik rendahnya partisipasi perempuan dalam politik Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan dan praktik yang dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan analisis deskriptif. Robert K. Yin (2014) menyatakan bahwa studi kasus adalah metode untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Yin menekankan bahwa studi kasus dapat menggunakan berbagai sumber bukti, termasuk data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan analisis deskriptif menurut Suharsimi Arikunto (2013) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi tertentu dan memaparkannya dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.

Hasil dan Pembahasan

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu regulasi yang sangat penting dalam konteks kesetaraan gender di dunia politik Indonesia. Pasal ini mengatur tentang kewajiban partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur kepengurusan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dalam pencalonan anggota legislatif. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam politik dan pembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengurangi ketimpangan gender yang selama ini terjadi di lembaga legislatif.

Sebelum UU tentang keterwakilan perempuan di DPR RI diberlakukan, partai politik di Indonesia umumnya dikuasai oleh pria dan jarang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam partai. Dengan adanya ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, diharapkan perempuan mendapatkan posisi strategis untuk mempengaruhi arah kebijakan partai, serta mendorong partai untuk lebih memperhatikan isu-isu gender dalam pembuatan kebijakan.

Selain pada kepengurusan partai, Pasal 53 juga berkontribusi pada peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu. Dengan memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai, secara tidak langsung hal ini membuka peluang bagi perempuan untuk lebih banyak dicalonkan dalam pemilu, baik di tingkat DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini penting karena partai politik memiliki peran dominan dalam menentukan calon legislatif. Dengan keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia, termasuk di DPR RI, sangat rendah. Meskipun jumlah perempuan lebih dari 49% dari total populasi di Indonesia, namun keberadaan di parlemen tidak mencerminkan posisi tersebut.

Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Politik di Indonesia

Budaya patriarki di Indonesia masih menjadi salah satu hambatan utama dalam keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Menurut Nimrah, S & Sakaria, S (2015) patriarki yang merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki mendominasi struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, secara signifikan mempengaruhi partai politik, struktur pemerintahan, serta persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, yang memandang laki-laki sebagai pemimpin alami dan perempuan sebagai pihak yang lebih cocok mengurus urusan domestik.

Stereotip ini mempengaruhi bagaimana perempuan dipandang dalam konteks politik. Dalam partai politik, peran perempuan seringkali dibatasi pada posisi simbolis atau administratif, bukan pada posisi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang terjun ke dunia politik seringkali dipandang tidak sesuai dengan peran tradisional mereka sebagai ibu atau istri dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Stigma ini membuat banyak perempuan tidak mau untuk maju.

Akses yang terbatas terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan juga menjadi hambatan dalam partisipasi di dunia politik. Banyak perempuan yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan politik yang memadai. Keterbatasan geografis dan infrastruktur yang tidak mendukung, seperti akses ke internet atau sumber daya pendidikan lainnya, membuat mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk terlibat dalam politik. Selain itu, pendidikan politik seringkali tidak terintegrasi dalam kurikulum formal di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Walaupun beberapa universitas menawarkan program studi ilmu politik, tidak semua perempuan, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi yang memadai di bidang ini.

Minimnya pendidikan politik bagi perempuan berakibat pada ketidakseimbangan representasi dan pengaruh mereka dalam proses pengambilan kebijakan, serta dalam kompetisi politik yang lebih luas. Tanpa pemahaman yang cukup, perempuan seringkali kesulitan untuk memahami hak-hak mereka sebagai pemilih dan calon legislatif.

Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting, mengingat LSM memiliki peran strategis dalam melakukan advokasi, pemberdayaan, dan kampanye untuk kesetaraan gender dalam politik. LSM, dengan jangkauan jaringan yang luas dan kedekatannya dengan masyarakat, dapat memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi politik perempuan.

Selain LSM, DPR memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah dengan menetapkan kuota minimal bagi perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Seperti menggunakan sistem zipper, dengan mekanismenya dalam daftar calon legislatif yang disusun oleh partai politik, di mana calon perempuan dan laki-laki harus disuruh secara bergantian. Misalnya, jika calon nomor 1 adalah laki-laki, maka calon nomor 2 harus perempuan, dan seterusnya. Melalui sistem ini, perempuan tidak hanya masuk ke dalam daftar calon legislatif, tetapi juga menempati posisi strategis yang memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, seperti nomor urutan teratas. Kemudian dapat dengan meningkatkan implementasi kuota perempuan minimal 30% di daftar calon legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Penegakan sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota ini harus dipertegas. Memastikan perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai "pengisi kuota" tetapi juga dalam posisi strategis di urutan atas daftar calon. Menyediakan program pelatihan untuk perempuan calon legislatif agar memiliki kapasitas politik, kemampuan komunikasi, dan pemahaman regulasi yang kuat.

Membangun jaringan antara politisi perempuan senior dan junior untuk berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan. Partai politik harus memastikan proses rekrutmen yang transparan dan inklusif untuk mengakomodasi lebih banyak perempuan potensial. Mengatasi norma atau budaya partai yang cenderung meminggirkan perempuan dalam proses pencalonan atau pengambilan keputusan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan melalui kampanye publik, diskusi, dan media massa. Mengedukasi pemilih agar memilih berdasarkan kualitas dan tidak bias terhadap calon perempuan. Memberikan dukungan finansial kepada calon perempuan untuk mengatasi kendala biaya yang sering menjadi hambatan utama. Memastikan perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya kampanye, termasuk media dan teknologi. Membentuk tim pengawas independen untuk memantau implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di DPR. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan afirmasi dan melakukan revisi jika diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan di DPR RI dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Di Indonesia, meskipun sudah ada aturan dalam Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penegakan aturan ini perlu diperkuat, dan partai politik diharapkan lebih berkomitmen untuk menempatkan perempuan di posisi yang strategis, baik dalam daftar calon legislatif maupun dalam struktur kepemimpinan partai.

Partai politik memiliki peran besar dalam mempersiapkan calon legislatif perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan dan pendidikan politik sangat penting. Pelatihan ini bisa mencakup pembekalan dalam hal kepemimpinan, manajemen kampanye, serta pemahaman mengenai isu-isu yang relevan dengan perempuan dan masyarakat. Dengan adanya pembinaan, perempuan diharapkan dapat lebih percaya diri untuk maju dalam pencalonan dan berkompetisi dengan calon legislatif lainnya. Perempuan kurang memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kampanye politik, seperti dana, jaringan, dan media. Perempuan sering menghadapi hambatan dalam mengumpulkan dana kampanye, yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan donor, stereotip gender, dan diskriminasi. Perempuan juga cenderung memiliki pendukung finansial yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. UN Women (2022) yang merupakan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menyatakan hanya sekitar 26% kursi parlemen global diisi oleh perempuan. Di banyak negara, budaya patriarki, diskriminasi gender, dan kurangnya dukungan partai politik menjadi hambatan utama. Sedangkan menurut Inter-Parliamentary Union (2023) perempuan di negara berkembang 16% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki ponsel dibandingkan laki-laki dan 43% lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan internet seluler. Selain itu, menurut *Mobile Gender Gap Report* (2022). Sekitar 129 juta anak perempuan di dunia tidak bersekolah, dengan proporsi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian menurut UNESCO (2022) faktor seperti pernikahan dini, beban kerja domestik, dan stereotip gender menjadi hambatan utama.

Untuk itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ini. Misalnya, melalui skema pendanaan kampanye yang mendukung calon perempuan atau pemberian bantuan untuk memperluas

jaringan politik mereka. Pendanaan kampanye yang transparan dan mendukung kesetaraan gender juga perlu didorong.

Salah satu tantangan utama bagi perempuan dalam dunia politik adalah minimnya dukungan dari partai politik. Menurut laporan dari Perludem (2022) menyebutkan bahwa partai politik di Indonesia sering hanya memenuhi kuota perempuan 30% secara simbolik, tanpa memberikan dukungan signifikan kepada calon perempuan. Partai politik memainkan peran kunci dalam memastikan keterwakilan perempuan, tetapi banyak partai tidak benar-benar berkomitmen pada kesetaraan gender. Sering kali, mereka hanya menganggap perempuan sebagai pemenuhan formalitas kuota. Menurut Dr. Mona Lena Krook (Ahli Gender dan Politik, 2022) sebagian besar partai politik tidak memiliki mekanisme internal untuk memastikan perempuan dicalonkan dalam jumlah yang cukup atau ditempatkan di posisi yang strategis pada daftar calon legislatif. Menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (2021) norma patriarki yang tertanam dalam struktur partai politik menciptakan hambatan bagi perempuan, baik dalam pencalonan maupun dalam pengambilan keputusan internal. Kemudian menurut Prof. Anne Phillips (Ahli Gender dan Demokrasi) banyak partai politik didominasi oleh laki-laki di posisi kepemimpinan, sehingga perempuan sulit mendapatkan akses untuk menduduki posisi strategis.

Budaya "*old boy's network*" sering kali mengesampingkan perempuan dari jaringan informal yang penting untuk mendapatkan dukungan. Perempuan hanya menempati 26% kursi parlemen global, sebagian besar karena hambatan struktural dalam partai politik, termasuk bias patriarki dalam proses pencalonan. Berdasarkan *Global Gender Gap Report* (2023) yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* menjelaskan bahwa perempuan sering dianggap kurang elektabilitas dibandingkan laki-laki, sehingga partai cenderung memprioritaskan laki-laki sebagai calon di daerah pemilihan yang kompetitif. Partai politik cenderung memberikan sumber daya, seperti dana kampanye, kepada kandidat laki-laki yang dianggap lebih mampu memenangkan suara. Banyak partai tidak memiliki program khusus untuk melatih, mendukung, atau mempromosikan perempuan calon legislatif.

Partai politik perlu memiliki kebijakan yang lebih mendukung kesetaraan gender, baik dalam rekrutmen, promosi, maupun penempatan calon perempuan di posisi-posisi strategis. Dengan adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perempuan akan lebih mudah untuk memasuki dan bertahan dalam dunia politik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di DPR juga sangat penting. Oleh karena itu, kampanye yang mendidik pemilih mengenai pentingnya memilih calon legislatif perempuan perlu diperkuat. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, forum-forum diskusi publik, atau program pendidikan di tingkat sekolah dan masyarakat. Meningkatkan pemahaman publik tentang peran perempuan dalam pembuatan kebijakan akan membantu meningkatkan dukungan terhadap calon perempuan dalam pemilu. LSM dan organisasi perempuan juga dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di DPR. Organisasi-organisasi ini dapat mendorong agenda kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, melakukan advokasi untuk perubahan regulasi yang lebih berpihak pada perempuan, serta menyediakan dukungan praktis bagi calon legislatif perempuan, seperti pelatihan kampanye atau jaringan sosial. Selain itu, LSM juga dapat memberikan pemantauan terhadap implementasi kebijakan terkait kesetaraan gender dalam politik.

Infrastruktur politik yang mendukung perempuan, seperti wadah-wadah diskusi atau jaringan perempuan di politik, perlu diperkuat. Jaringan perempuan ini bisa menjadi tempat

berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan satu sama lain, serta membangun solidaritas antar calon perempuan. Selain itu, perempuan yang telah terpilih di legislatif perlu diberikan ruang untuk saling mendukung dan memperjuangkan isu-isu perempuan, baik dalam forum DPR maupun di luar DPR.

Meningkatkan pendidikan politik untuk perempuan sejak dini sangat penting. Pendidikan politik dapat dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, di mana perempuan diberi pengetahuan dan keterampilan tentang politik, kepemimpinan, dan bagaimana berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap untuk terlibat dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. LSM juga dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada perempuan yang berprestasi dalam dunia politik, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk perempuan lainnya. Penghargaan ini bisa diberikan kepada perempuan yang berhasil terpilih di DPR atau yang berhasil memimpin kampanye yang sukses, serta mereka yang aktif dalam advokasi isu-isu perempuan. Penghargaan ini akan meningkatkan kepercayaan diri perempuan dan memberi contoh konkret kepada masyarakat tentang keberhasilan perempuan di dunia politik.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI melalui kampanye dan penyuluhan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial dan politik yang mendukung kesetaraan gender. Kampanye dan penyuluhan yang efektif dapat memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta memotivasi masyarakat untuk mendukung calon legislatif perempuan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kampanye dan penyuluhan.

Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam, terutama generasi muda. Kampanye digital yang mengangkat isu kesetaraan gender dan pentingnya keterwakilan perempuan di DPR dapat dilaksanakan melalui platform seperti Instagram, X, Facebook, dan TikTok. LSM, organisasi perempuan, atau individu yang mendukung kesetaraan gender dapat membuat konten yang informatif, menarik, dan mudah dibagikan, seperti infografis, video, atau cerita inspiratif tentang perempuan yang berperan di dunia politik.

Untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik, penyuluhan langsung di komunitas-komunitas lokal dan sekolah-sekolah dapat sangat efektif. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui seminar, diskusi kelompok, atau lokakarya yang mengangkat isu keterwakilan perempuan dan pentingnya hak politik perempuan. Hal ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk di daerah-daerah yang mungkin kurang terjangkau oleh kampanye media sosial.

Di tingkat pendidikan formal, seperti sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi, dapat diadakan diskusi atau seminar mengenai politik, hak perempuan, dan pentingnya pemilihan perempuan di lembaga legislatif. Pemahaman tentang politik harus dimulai sejak usia muda, sehingga generasi mendatang dapat lebih mendukung keterwakilan perempuan. Penyuluhan di desa-desa atau daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, misalnya menggunakan poster atau brosur yang menjelaskan mengapa pemilih harus mendukung perempuan untuk duduk di DPR. Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk berbicara langsung bisa meningkatkan efektivitas kampanye ini.

Kampanye juga harus berfokus pada mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyoroti peran perempuan yang sudah aktif di politik, sehingga perempuan lainnya termotivasi untuk ikut serta. Dalam kampanye ini, perempuan harus diyakinkan bahwa suara mereka sangat berarti, baik dalam memilih wakil mereka maupun dalam berperan aktif dalam proses politik.

Kampanye yang menekankan pentingnya hak suara perempuan dan bagaimana suara mereka dapat membawa perubahan. Kampanye ini bisa dilaksanakan dengan melibatkan perempuan yang sudah terpilih di DPR untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mengapa mereka merasa penting untuk terlibat di dunia politik. Selain mendorong perempuan untuk memilih, kampanye juga bisa melibatkan ajakan kepada perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. LSM dapat membantu perempuan untuk mengetahui proses pencalonan dan memberikan dukungan moral serta pelatihan untuk menghadapi tantangan politik. Meskipun media sosial memiliki jangkauan yang luas, media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar masih memiliki peran penting dalam menjangkau audiens yang lebih tua atau mereka yang tidak aktif di dunia maya. Penyuluhan melalui media tradisional ini bisa lebih luas dan formal, serta memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat.

Pemerintah atau LSM bisa bekerja sama dengan stasiun televisi dan radio untuk menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM) yang mengajak masyarakat untuk memilih calon perempuan di DPR dan menjelaskan alasan-alasan mengapa keterwakilan perempuan sangat penting.

Kampanye dan penyuluhan harus mencakup informasi yang konkret mengenai bagaimana keterwakilan perempuan di DPR dapat menguntungkan seluruh masyarakat, bukan hanya perempuan itu sendiri. Dengan menunjukkan contoh kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan ketika ada lebih banyak perempuan di legislatif (misalnya, kebijakan tentang kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, dan penguatan ekonomi perempuan), masyarakat akan lebih memahami manfaat dari keterwakilan perempuan.

LSM dapat menyelenggarakan forum diskusi atau debat publik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di DPR, yang melibatkan berbagai pihak, seperti politisi, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Forum ini bisa menjadi ruang untuk memperbincangkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik dan bagaimana masyarakat bisa turut berperan dalam mengatasi hal tersebut. Mengadakan debat atau diskusi terbuka yang melibatkan tokoh-tokoh perempuan yang aktif di dunia politik atau calon perempuan yang akan maju dalam pemilu, untuk berbicara tentang visi mereka dan mengapa mereka layak dipilih. Hal ini dapat membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan pemilih tentang pentingnya memilih perempuan. Kampanye dan penyuluhan juga harus memperkuat jaringan antara LSM, organisasi perempuan, dan berbagai komunitas untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Kerjasama antar lembaga ini dapat menciptakan jaringan yang lebih besar dan lebih berpengaruh untuk menyebarkan pesan-pesan positif mengenai keterwakilan perempuan di DPR.

Kampanye dan penyuluhan kesadaran masyarakat adalah langkah yang sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Dengan memanfaatkan berbagai media dan pendekatan yang relevan dengan audiens yang berbeda, masyarakat

dapat lebih memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pembuatan kebijakan. Upaya ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender, serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses legislatif dan pemerintahan.

Penguatan peran media dalam memperkenalkan pemimpin perempuan adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kemampuan serta kontribusi perempuan dalam bidang politik. Oleh karena itu, media dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam memperkenalkan perempuan sebagai pemimpin politik yang kompeten, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR melalui penguatan peran media.

Media harus lebih proaktif dalam menampilkan perempuan sebagai pemimpin yang kompeten, memiliki integritas, dan mampu membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, khususnya perempuan. Media harus memuat berita, artikel, atau wawancara dengan perempuan yang berhasil dalam karier politik mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Cerita sukses pemimpin perempuan ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam dunia politik. Menyoroti perjalanan karier mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta pencapaian yang telah diraih akan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin.

Termasuk mengangkat isu yang relevan dengan perempuan seperti kesehatan reproduksi, kesetaraan ekonomi, kekerasan berbasis gender, dan pemberdayaan perempuan. Dengan cara ini, pemimpin perempuan akan lebih dikenal publik melalui peran mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di masyarakat. Salah satu cara untuk memperkuat peran media adalah dengan memastikan adanya representasi yang adil antara perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan politik. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali diberitakan dengan cara yang kurang adil, seperti lebih sering dilihat sebagai "pendamping" atau "penunjang" dalam kegiatan politik, sementara laki-laki sering diberitakan sebagai pemimpin utama. Keseimbangan dalam pemberitaan, media harus berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan politik. Ini mencakup menyajikan perempuan sebagai kandidat yang berkompeten, berpendidikan, dan memiliki visi yang jelas dalam berkampanye. Setiap partai politik yang mencalonkan perempuan sebagai kandidat di DPR juga harus mendapatkan pemberitaan yang seimbang dan tidak hanya fokus pada calon laki-laki.

Media perlu berhati-hati untuk menghindari pemberitaan yang bias gender, seperti menilai calon perempuan berdasarkan penampilan fisik atau stereotip sosial, yang tidak relevan dengan kemampuan dan kualifikasi mereka. Sebaliknya, media harus mengedepankan kredibilitas, visi, dan rekam jejak perempuan yang mencalonkan diri di DPR. Media juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu. Melalui penyuluhan dan edukasi tentang hak-hak politik perempuan, media bisa memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pentingnya memilih calon perempuan yang dapat mewakili suara mereka di DPR.

Media harus mengedukasi pemilih tentang isu-isu penting yang menjadi fokus perempuan dalam politik, misalnya hak kesehatan perempuan, kesetaraan kesempatan kerja,

atau perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dengan menunjukkan bagaimana perempuan calon legislatif memperjuangkan isu-isu tersebut, media akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informatif.

Media harus memperkuat kapasitas jurnalistik mereka untuk lebih sensitif terhadap isu gender. Hal ini mencakup pelatihan bagi jurnalis agar mereka dapat lebih objektif dan adil dalam meliput perempuan di dunia politik tanpa terjebak dalam stereotip gender. Jurnalis yang paham dan terlatih dalam perspektif gender akan lebih mampu menghadirkan berita yang tidak hanya menggambarkan perempuan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki suara dan pengaruh.

Kesimpulan

Meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif yang menetapkan kuota minimal 30% untuk pencalonan perempuan, realitas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Pemilu masih rendah, dengan angka keterpilihan hanya mencapai sekitar 22% pada Pemilu 2024. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam sistem politik, tetapi juga berpotensi menghambat pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai dampak signifikan dalam kebijakan publik, diperlukan jumlah perempuan yang mencapai minimal 30% di parlemen.

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan harus menjadi prioritas nasional, bukan sekedar memenuhi kuota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perspektif dan kebutuhan seluruh masyarakat termasuk perempuan. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengurangi hambatan struktural yang selama ini menghalangi partisipasi aktif perempuan dalam politik. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan partai politik, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlebitan perempuan di DPR RI.

Daftar Pustaka

- Daniswara, V. O., & Riwanto, A. (2019). Keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu tahun 2019. *Jurnal Respublica*.
- Jayani, P. H., Shafira, F. M., Anindya, S., & Ummah, A. (2024). Representasi gender di parlemen pasca pemilu 2019: Tantangan dan peluang menuju kesetaraan gender dalam pembangunan politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 37-45.
- Mu'awanag, E. (2020). Reformasi keterwakilan perempuan di DPR RI: Tantangan dan strategi. *Jurnal Unhas*.
- Nimrah, S., & Sakaria. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(2), 173-181.
- Rahmawati, S. (2022). Peran perempuan dalam politik: Studi kasus keterwakilan di DPR RI. *Jurnal politik dan kebijakan*, 8(3), 200-215.

- Sartika, D.(2023). Keterwakilan perempuan dalam kebijakan publik di Indonesia: Analisis kritis terhadap tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 100-115.
- Soetjipto, A. W.(2019). Representasi perempuan di parlemen hasil pemilu 2019: Analisis dan rekomendasi. *Jurnal Kajian Politik*.
- Susanti, R.(2024). Tantangan dan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia: Perspektif gender dalam politik legislatif. *Jurnal Gender dan Politik*, 3(1), 50-56.
- Widayati Soetjipto, A., & Mu'awanah, E.(2020). Penguatan keterwakilan perempuan di legislatif: Analisis kebijakan dan implementasi di DPR RI. *Journal of Political Science and Public Affairs*, 8(2), 45-40.
- Yulianti, D., & Pramono, B.(2021). Urgensi dan dampak pemberlakuan ambang batas 30% perempuan dalam partai politik untuk calon anggota legislatif di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 6(1), 1-15.